

Volume 11 Nomor 2 Agustus 2026
E-ISSN 2541-0938 P-ISSN 2657-1528

JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI JURKAMI

JURKAMI

VOLUME 11
NOMOR 2

SINTANG
AGUSTUS
2026

DOI
10.31932

E-ISSN
2541-0938
P-ISSN
2657-1528

**PERKEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN WILAYAH PESISIR DESA
UJUNG PANDARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Arniwaty^{1✉}, Wiwin Zakiah², Fadeli Yusuf Afif³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Indonesia ^{1,2,3}

✉Corresponding Author Email: arniwatypky@gmail.com¹

Author Email : wiwin.zakiah@feb.upr.ac.id², fadeli.yusufafif@feb.upr.ac.id³

Abstract:

Article History:
Received: July 2026
Revision: August 2026
Accepted: August 2026
Published: August 2026

Keywords:
Coastal Abrasion;
Coastal Management;
Coastal Tourism;
Sustainable Economic
Development; Ujung
Pandaran.

Ujung Pandaran Village has considerable coastal economic potential through capture fisheries, marine-based microenterprises, and coastal tourism. However, coastal abrasion has damaged infrastructure, disrupted fishing activities, reduced the attractiveness of tourist destinations, and increased income uncertainty among local communities. This study aims to analyze the coastal economy, identify the impacts of abrasion on livelihood sustainability, and formulate strategies for sustainable economic development. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with village officials, fishers, microenterprise owners, tourism managers, community leaders, and representatives of relevant government agencies. The data were analyzed interactively through data reduction, presentation, verification, and conclusion drawing. The findings indicate that dependence on fisheries and tourism increases the community's economic vulnerability to coastal degradation. Local communities have developed processed seafood products and tourism activities as forms of economic diversification; however, value creation, market access, institutional capacity, and coastal protection remain limited. Sustainable coastal economic development requires product diversification, digital marketing, community-based ecotourism, stronger local institutions, coastal vegetation rehabilitation, and stakeholder collaboration. These findings emphasize that coastal conservation should be regarded as an economic investment that protects productive assets, stabilizes household income, and sustains local businesses.

Abstrak:

Sejarah Artikel:
Diterima: July 2026
Direvisi: Agustus 2026
Disetujui: Agustus 2026
Diterbitkan: Agustus 2026

Kata kunci:
Abrasi Pantai;
Ekonomi
Berkelanjutan;
Pengelolaan Pesisir;
Pariwisata Bahari;
Ujung Pandaran.

Desa Ujung Pandaran memiliki potensi ekonomi pesisir melalui perikanan tangkap, usaha mikro berbasis hasil laut, dan pariwisata bahari. Namun, abrasi pantai telah merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas nelayan, mengurangi daya tarik wisata, serta meningkatkan ketidakpastian pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi ekonomi pesisir, mengidentifikasi dampak abrasi terhadap keberlanjutan mata pencaharian, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan aparat desa, nelayan, pelaku usaha mikro, pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Data dianalisis secara interaktif melalui reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada perikanan dan pariwisata meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap kerusakan pesisir. Masyarakat telah mengembangkan produk olahan hasil laut dan kegiatan wisata sebagai bentuk diversifikasi, tetapi nilai tambah, akses pasar, kapasitas kelembagaan, dan perlindungan kawasan pesisir masih terbatas. Ekonomi pesisir berkelanjutan perlu dikembangkan melalui diversifikasi produk, pemasaran digital, ekowisata berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, rehabilitasi vegetasi pantai, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Temuan ini menegaskan bahwa konservasi pesisir merupakan investasi ekonomi untuk menjaga aset produktif, stabilitas pendapatan, dan keberlanjutan usaha masyarakat.



How to Cite: Arniwaty, Wiwin Zakiah, Fadeli Yusuf Afif. 2026. PERKEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN WILAYAH PESISIR DESA UJUNG PANDARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 11 (2), DOI: <https://doi.org/10.31932/jpe.v11i2.7186>

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki peran strategis dalam perekonomian masyarakat melalui kegiatan perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, perdagangan, dan pariwisata bahari. Bagi masyarakat pesisir, sumber daya laut tidak hanya menjadi aset ekologis, tetapi juga menjadi modal utama dalam membentuk pendapatan, kesempatan kerja, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Stacey et al. (2021) menjelaskan bahwa perikanan skala kecil di Indonesia berperan penting dalam menopang mata pencaharian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya pesisir juga menyebabkan perekonomian masyarakat rentan terhadap perubahan lingkungan, kerusakan ekosistem, cuaca ekstrem, dan perubahan garis pantai. Dengan demikian, pembangunan ekonomi pesisir perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan yang tetap menjaga keberlanjutan sumber daya sebagai basis penghidupan masyarakat.

Salah satu tekanan lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir adalah abrasi pantai. Abrasi tidak hanya mengakibatkan mundurnya garis pantai dan hilangnya daratan, tetapi juga dapat merusak permukiman, fasilitas usaha, infrastruktur perikanan, dan kawasan wisata. Dampak tersebut selanjutnya meningkatkan biaya operasional, menurunkan produktivitas usaha, membatasi ruang aktivitas ekonomi, dan menciptakan ketidakpastian pendapatan masyarakat. Pang et al. (2023)

menunjukkan bahwa erosi pesisir berkaitan dengan peningkatan risiko sosial-ekonomi, terutama pada masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya pesisir. Bagindo et al. (2023) juga menemukan bahwa abrasi telah menimbulkan perubahan sosial-ekonomi pada masyarakat nelayan, antara lain melalui terganggunya mata pencaharian, perubahan pola pemanfaatan ruang, dan meningkatnya kerentanan rumah tangga pesisir. Oleh karena itu, abrasi perlu ditempatkan sebagai persoalan pembangunan ekonomi, bukan sekadar persoalan perubahan fisik pantai.

Persoalan tersebut juga dihadapi Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Desa ini memiliki tiga basis kegiatan ekonomi utama, yaitu perikanan tangkap, usaha mikro berbasis pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari. Ketiga sektor tersebut saling berkaitan karena hasil perikanan menjadi bahan baku usaha pengolahan, sedangkan aktivitas wisata membentuk pasar bagi produk kuliner, penginapan, jasa rekreasi, dan produk lokal. Akan tetapi, potensi tersebut menghadapi tekanan abrasi yang memengaruhi kondisi pantai dan ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian Sakka dan Baharuddin (2021) telah mendokumentasikan perubahan garis pantai dan kehilangan daratan akibat abrasi di Pantai Ujung Pandaran serta merekomendasikan penanganan melalui pendekatan struktural dan nonstruktural. Kajian tersebut memberikan informasi penting mengenai kondisi fisik pantai,



tetapi belum membahas secara mendalam bagaimana abrasi memengaruhi keberlanjutan pendapatan nelayan, usaha mikro, pariwisata, dan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan penghidupan.

Kerentanan ekonomi pesisir dapat dijelaskan melalui pendekatan *sustainable livelihoods*. Pendekatan ini memandang keberlanjutan penghidupan sebagai kemampuan masyarakat dalam mengelola modal alam, manusia, sosial, fisik, dan finansial untuk menghadapi tekanan dan mempertahankan kesejahteraan (Scoones, 2022). Dalam konteks Desa Ujung Pandaran, abrasi mengurangi kualitas modal alam dan fisik melalui kerusakan kawasan pantai dan fasilitas ekonomi. Gangguan terhadap kedua modal tersebut berpotensi memengaruhi modal finansial masyarakat melalui penurunan pendapatan dan meningkatnya biaya untuk mempertahankan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, adaptasi masyarakat tidak cukup dilakukan melalui perlindungan fisik garis pantai, tetapi perlu disertai diversifikasi usaha, peningkatan keterampilan, penguatan kelembagaan lokal, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa diversifikasi mata pencaharian dapat meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam menghadapi guncangan. Suradja et al. (2024) menemukan bahwa pengembangan kegiatan pariwisata dapat menjadi sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat desa pesisir, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat, akses pasar, dan kualitas pengelolaan destinasi. Abbas et al. (2025) menegaskan bahwa integrasi antara *blue economy* dan *community-based ecotourism* dapat

memperluas peluang ekonomi sekaligus menciptakan insentif bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir. Rozaki et al. (2025) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan tata kelola yang transparan menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi pariwisata pesisir dapat didistribusikan secara lebih merata. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan ekonomi pesisir membutuhkan diversifikasi kegiatan ekonomi dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Pendekatan *blue economy* memberikan kerangka pembangunan yang menempatkan pemanfaatan sumber daya laut, penciptaan nilai tambah, dan perlindungan ekosistem sebagai satu kesatuan. Penerapannya tidak terbatas pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga mencakup pengolahan hasil laut, pariwisata berkelanjutan, inovasi usaha, konservasi pesisir, dan penguatan kapasitas masyarakat. Hidayati dan de Vries (2025) memperlihatkan bahwa pengembangan komoditas pesisir dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat apabila didukung oleh penguatan rantai nilai, kelembagaan, dan akses terhadap manfaat ekonomi. Kajian Masri et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keberlanjutan mata pencaharian pada destinasi wisata pesisir ditentukan oleh hubungan antara aset penghidupan, kapasitas adaptasi, tata kelola, dan kualitas ekosistem. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan Desa Ujung Pandaran perlu menghubungkan penanganan abrasi dengan strategi penguatan sektor perikanan, usaha mikro, dan pariwisata berbasis masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas perubahan fisik Pantai Ujung Pandaran, dampak abrasi terhadap



masyarakat nelayan, diversifikasi penghidupan, dan pengembangan pariwisata pesisir. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan aspek fisik pantai, perikanan, pariwisata, atau pemberdayaan masyarakat sebagai fokus yang terpisah. Masih terbatas penelitian yang secara terpadu menjelaskan hubungan antara abrasi, keberlanjutan kegiatan ekonomi lokal, kapasitas adaptasi masyarakat, dan kebutuhan kolaborasi kelembagaan pada wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Kesenjangan ini penting dikaji karena strategi penanganan fisik pantai belum tentu dapat memulihkan pendapatan masyarakat apabila tidak disertai penguatan struktur ekonomi dan kapasitas adaptasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis abrasi sebagai guncangan terhadap sistem ekonomi lokal yang menghubungkan sektor perikanan tangkap, usaha mikro berbasis hasil laut, dan pariwisata bahari. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif *sustainable livelihoods*, *blue economy*, dan tata kelola kolaboratif dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi pesisir. Integrasi tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana konservasi pantai, diversifikasi usaha, peningkatan nilai tambah produk, penguatan kelembagaan masyarakat, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Desa Ujung Pandaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ekonomi pesisir, mengidentifikasi dampak abrasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dan merumuskan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian

diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi ekonomi masyarakat pesisir, dampak abrasi terhadap aktivitas ekonomi, dan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, persepsi, dan respons masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi pesisir. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive karena Desa Ujung Pandaran memiliki potensi ekonomi yang bersumber dari perikanan tangkap, usaha mikro berbasis hasil laut, dan pariwisata bahari, tetapi menghadapi ancaman abrasi yang memengaruhi keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi maupun pengelolaan wilayah pesisir. Informan meliputi aparatur desa, tokoh masyarakat, nelayan, pelaku usaha mikro berbasis hasil laut, pengelola kawasan wisata, serta perwakilan instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Pemilihan informan dilakukan secara bertahap sampai informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang konsisten dan tidak ditemukan informasi baru yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan mencakup masyarakat yang berdomisili atau

menjalankan kegiatan ekonomi di Desa Ujung Pandaran serta pihak yang mengetahui perkembangan ekonomi, dampak abrasi, dan program pengelolaan kawasan pesisir.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik kawasan pesisir, bentuk aktivitas ekonomi masyarakat, kondisi fasilitas pendukung, serta dampak abrasi terhadap kegiatan perikanan, usaha mikro, dan pariwisata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai sumber penghidupan, perkembangan usaha, perubahan pendapatan, dampak abrasi, bentuk adaptasi masyarakat, peran kelembagaan, dan dukungan pemerintah. Dokumentasi berupa foto lapangan, profil desa, data statistik, laporan pemerintah, dan dokumen program pembangunan digunakan untuk melengkapi serta mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan ekonomi pesisir serta abrasi pantai.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu potensi ekonomi pesisir, dampak abrasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dibandingkan untuk

menemukan kesamaan, perbedaan, dan pola hubungan antartemuan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan, sustainable livelihoods, blue economy, dan tata kelola kolaboratif. Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan pesisir, keberlanjutan kegiatan ekonomi, kemampuan adaptasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan di Desa Ujung Pandaran.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang disampaikan oleh aparat desa, nelayan, pelaku usaha, pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen pendukung. Informasi yang belum konsisten dikonfirmasi kembali kepada informan terkait agar interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan seluruh informasi yang diperoleh digunakan untuk kepentingan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Ekonomi Pesisir Desa Ujung Pandaran

Desa Ujung Pandaran memiliki potensi ekonomi pesisir yang didukung oleh tiga sektor utama, yaitu perikanan tangkap, industri kreatif berbasis hasil laut, dan pariwisata bahari. Ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi lokal yang saling mendukung dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan



ekonomi rumah tangga nelayan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan laut, tetapi juga berkembang melalui usaha pengolahan hasil perikanan dan jasa wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Ujung Pandaran memiliki karakteristik ekonomi

pesisir yang cukup beragam sehingga berpotensi dikembangkan melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Hasil pemetaan lapangan mengidentifikasi beberapa bentuk usaha yang menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Ekonomi Pesisir Desa Ujung Pandaran

Sektor	Aktivitas Utama	Kontribusi terhadap Masyarakat
Perikanan tangkap	Penangkapan ikan, kepiting, dan rajungan	Sumber pendapatan utama nelayan
Industri pengolahan hasil laut	Produksi ikan asin, terasi, kerupuk telur ikan, olahan kepiting	Meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan dan pendapatan rumah tangga
Pariwisata bahari	Pantai Ujung Pandaran, wisata religi, wahana rekreasi air, kuliner laut	Mendorong pertumbuhan UMKM dan jasa wisata
Kelembagaan masyarakat	Pokdarwis Garda Pesisir	Mengelola aktivitas wisata berbasis masyarakat dan memperkuat partisipasi lokal

Sumber: Diolah dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Hasil tangkapan laut kemudian diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti ikan asin, terasi, kerupuk telur ikan, serta olahan kepiting dan rajungan yang dipasarkan di tingkat lokal maupun regional. Diversifikasi usaha tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan pada penjualan hasil tangkapan dalam bentuk segar. Selain itu, berkembangnya sektor pariwisata bahari turut menciptakan berbagai aktivitas ekonomi turunan berupa penyediaan penginapan, warung makan, penyewaan wahana wisata, dan jasa pemandu wisata. Keberadaan Pokdarwis Garda Pesisir

menjadi faktor penting dalam mengoordinasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat lokal.

Dampak Abrasi terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir

Potensi ekonomi yang dimiliki Desa Ujung Pandaran menghadapi ancaman serius akibat abrasi pantai yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, abrasi telah menyebabkan kerusakan fisik kawasan pesisir, berkurangnya ruang aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap kehilangan sumber penghidupan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh pelaku

UMKM, pengelola wisata, dan masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi pesisir. Ringkasan dampak abrasi terhadap

aktivitas ekonomi masyarakat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dampak Abrasi terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Ujung Pandaran

Aspek	Dampak yang Ditemukan
Infrastruktur	Kerusakan jalan pesisir, gazebo wisata, fasilitas umum, dan sebagian permukiman
Pariwisata	Penurunan daya tarik kawasan wisata dan berkurangnya kunjungan wisatawan
UMKM	Penurunan omzet usaha serta meningkatnya biaya perbaikan fasilitas usaha
Perikanan	Terganggunya aktivitas nelayan akibat perubahan garis pantai dan gelombang tinggi
Lingkungan	Berkurangnya vegetasi pantai dan meningkatnya kerentanan terhadap abrasi lanjutan

Sumber: Diolah dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.

Berdasarkan Tabel 2, dampak abrasi tidak hanya berupa kerusakan fisik kawasan pesisir, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Kerusakan fasilitas wisata menyebabkan penurunan daya tarik destinasi sehingga berimplikasi pada berkurangnya pendapatan pelaku usaha wisata. Pada sektor UMKM, kerusakan bangunan usaha dan menurunnya jumlah pengunjung mengakibatkan penurunan omzet, sedangkan nelayan menghadapi risiko yang lebih tinggi akibat perubahan kondisi pantai dan gelombang laut. Temuan ini menunjukkan bahwa abrasi telah berkembang menjadi persoalan sosial-

ekonomi yang memerlukan penanganan terpadu, bukan sekadar upaya perlindungan fisik garis pantai.

Strategi Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis lapangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan di Desa Ujung Pandaran memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, kelembagaan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Strategi tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tabel 3. Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Desa Ujung Pandaran

Bidang Strategis	Rekomendasi Pengembangan
Konservasi pesisir	Rehabilitasi mangrove, penanaman vegetasi pantai, dan penguatan kawasan konservasi
Pariwisata	Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas destinasi
UMKM	Diversifikasi produk hasil laut, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pemasaran
Kelembagaan	Penguatan kapasitas Pokdarwis dan kelompok masyarakat pesisir
Tata kelola	Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media

Sumber: Hasil sintesis observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi pesisir bergantung pada sinergi antara konservasi lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove dan perlindungan kawasan konservasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko abrasi. Pada saat yang sama, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, diversifikasi produk UMKM hasil laut, serta penguatan kelembagaan lokal melalui Pokdarwis diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix menjadi fondasi utama dalam memastikan implementasi strategi pembangunan ekonomi pesisir yang efektif dan berkelanjutan

Pembangunan Ekonomi Pesisir dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi Desa Ujung Pandaran ditopang oleh tiga sektor yang saling berkaitan, yaitu perikanan tangkap, usaha mikro berbasis hasil laut, dan pariwisata bahari. Perikanan menyediakan sumber pendapatan dan bahan baku, usaha mikro meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan, sedangkan pariwisata memperluas pasar bagi produk lokal serta menciptakan permintaan terhadap jasa kuliner, penginapan, dan rekreasi. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya hasil tangkapan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mengolah, memasarkan, dan menghubungkan produk perikanan dengan kegiatan pariwisata.

Usaha pengolahan ikan asin, terasi, kerupuk hasil laut, kepiting, dan rajungan menunjukkan adanya upaya masyarakat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya pesisir. Pengolahan hasil tangkapan dapat mengurangi ketergantungan pada penjualan produk segar yang harganya mudah berubah sekaligus memperpanjang masa simpan produk. Temuan ini sejalan dengan Asriati dan Wardani (2023) yang menunjukkan bahwa diversifikasi produk menjadi kerupuk, abon, dan produk olahan ikan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir. Stacey et al. (2021) juga menjelaskan bahwa keberlanjutan mata pencaharian nelayan skala kecil memerlukan diversifikasi usaha, penguatan kapasitas masyarakat, akses pasar, dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, pengembangan produk olahan di Desa Ujung Pandaran perlu ditempatkan sebagai strategi peningkatan nilai tambah, bukan hanya kegiatan ekonomi rumah tangga.

Pariwisata bahari memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perikanan. Keberadaan Pantai Ujung Pandaran mendorong tumbuhnya rumah makan, penginapan, jasa wisata, kios produk lokal, dan kegiatan ekonomi pendukung lainnya. Diversifikasi tersebut penting karena pendapatan dari perikanan sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan kondisi gelombang. Suradja et al. (2024) menemukan bahwa pariwisata dapat memperkuat kemampuan masyarakat pesisir menghadapi guncangan apabila dikelola sebagai sumber penghidupan alternatif. Abbas et al. (2025) juga menegaskan bahwa integrasi *blue economy* dengan *community-based ecotourism* dapat



meningkatkan kesejahteraan sekaligus membangun insentif ekonomi bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Artinya, pengembangan pariwisata Ujung Pandaran perlu memberikan ruang yang besar bagi keterlibatan masyarakat lokal agar manfaat ekonominya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Keterkaitan antara perikanan, usaha mikro, dan pariwisata memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi pesisir harus dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi. Pertumbuhan salah satu sektor akan memberikan manfaat kepada sektor lain, tetapi gangguan pada sumber daya pesisir juga dapat memengaruhi seluruh kegiatan ekonomi tersebut. Keberlanjutan ekonomi Desa Ujung Pandaran karena itu bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa menurunkan kualitas lingkungan yang menjadi basis produksi dan daya tarik wisata. Hal tersebut sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta pendekatan *blue economy* yang mengarahkan pemanfaatan sumber daya laut untuk menciptakan pertumbuhan, pekerjaan, dan penghidupan dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem (United Nations, 2024; World Bank, 2024).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa potensi sumber daya saja belum cukup untuk menjamin keberlanjutan ekonomi. Masyarakat memerlukan keterampilan pengolahan, inovasi produk, kemampuan pemasaran, kelembagaan usaha, dan kesadaran lingkungan. Widanarni et al. (2026) menemukan bahwa penguatan kompetensi lingkungan, pembelajaran, dan inovasi hijau dapat memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekaligus mendukung

pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Implikasinya, pengembangan ekonomi Desa Ujung Pandaran harus disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat mampu menghasilkan produk bernilai tambah dan menerapkan praktik usaha yang tidak memperbesar tekanan terhadap lingkungan.

Dampak Abrasi terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa abrasi telah berkembang dari persoalan fisik pantai menjadi ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi Desa Ujung Pandaran. Kerusakan garis pantai mengurangi ruang aktivitas masyarakat, merusak fasilitas wisata, mengganggu kegiatan nelayan, dan menurunkan kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik destinasi. Sakka dan Baharuddin (2021) sebelumnya telah mengidentifikasi terjadinya perubahan garis pantai dan kehilangan daratan di Pantai Ujung Pandaran. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa perubahan fisik pantai juga menimbulkan konsekuensi terhadap kegiatan perikanan, usaha mikro, dan pariwisata.

Pada sektor perikanan, perubahan kondisi pantai dan gelombang meningkatkan risiko kegiatan penangkapan serta mengganggu penggunaan fasilitas pesisir. Gangguan tersebut dapat mengurangi jumlah hari melaut, meningkatkan biaya operasional, dan menyebabkan pendapatan nelayan menjadi semakin tidak stabil. Dampaknya tidak berhenti pada rumah tangga nelayan karena usaha pengolahan hasil laut bergantung pada ketersediaan bahan baku. Ketika hasil

tangkapan berkurang atau tidak stabil, kapasitas produksi dan omzet usaha pengolahan juga ikut terdampak. Kondisi ini memperlihatkan adanya efek berantai dari kerusakan lingkungan terhadap sistem ekonomi lokal. Bagindo et al. (2023) juga menemukan bahwa abrasi dapat mengubah pola mata pencaharian dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat nelayan.

Abrasi juga memengaruhi sektor pariwisata karena kualitas lingkungan pantai merupakan bagian utama dari daya tarik destinasi. Kerusakan pantai dan fasilitas wisata dapat mengurangi kenyamanan serta minat kunjungan. Penurunan aktivitas wisata kemudian memengaruhi pendapatan rumah makan, penginapan, kios, penyedia jasa rekreasi, dan pelaku usaha mikro lainnya. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan memiliki nilai kerugian ekonomi yang lebih luas daripada biaya perbaikan fisik pantai. Keberlanjutan pariwisata Ujung Pandaran karena itu tidak dapat dipisahkan dari perlindungan garis pantai, kebersihan kawasan, dan pemulihan fasilitas wisata.

Dalam perspektif *sustainable livelihoods*, abrasi mengganggu beberapa modal penghidupan masyarakat secara bersamaan. Kerusakan pantai menurunkan kualitas modal alam, sedangkan kerusakan fasilitas dan ruang usaha mengurangi modal fisik. Gangguan terhadap kegiatan perikanan, pengolahan, dan pariwisata selanjutnya menekan modal finansial melalui penurunan atau ketidakstabilan pendapatan. Dampak tersebut menjadi lebih besar ketika rumah tangga hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Oleh karena itu, tingkat ketahanan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi abrasi, tetapi juga

oleh kepemilikan alternatif penghidupan, keterampilan, akses pembiayaan, jaringan pemasaran, dan dukungan kelembagaan.

Masyarakat Desa Ujung Pandaran telah melakukan adaptasi melalui pengolahan hasil laut dan pengembangan aktivitas wisata. Akan tetapi, adaptasi tersebut masih bersifat terbatas karena pelaku usaha menghadapi kendala modal, pemasaran, keterampilan, dan kelembagaan. Asriati dan Wardani (2023) menemukan bahwa keterbatasan dana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lemahnya kerja sama antarpihak menjadi hambatan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pesisir. Temuan tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi usaha tidak akan berkembang secara optimal apabila hanya mengandalkan kemampuan rumah tangga. Dukungan pelatihan, pembiayaan, pendampingan produk, dan akses pasar diperlukan agar diversifikasi benar-benar mampu meningkatkan ketahanan ekonomi.

Implikasi temuan ini adalah penanganan abrasi tidak cukup dilakukan melalui pembangunan pelindung pantai. Infrastruktur tetap diperlukan untuk mengurangi kerusakan, tetapi harus disertai kebijakan pemulihan ekonomi bagi kelompok yang terdampak. Program tersebut dapat berupa bantuan peralatan produktif, pembiayaan usaha, penguatan rantai pemasaran, peningkatan keterampilan, dan pengembangan sumber pendapatan alternatif. Pendekatan ini menempatkan abrasi sebagai risiko pembangunan yang membutuhkan integrasi antara perlindungan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat.



Strategi Pengembangan Ekonomi Pesisir Berbasis *Blue Economy* dan Tata Kelola Kolaboratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi Desa Ujung Pandaran perlu mengintegrasikan perlindungan kawasan pesisir, penguatan usaha berbasis hasil laut, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pendekatan sektoral yang hanya meningkatkan produksi perikanan atau membangun infrastruktur pantai tidak cukup karena persoalan yang dihadapi saling berkaitan. Kerusakan lingkungan memengaruhi produksi dan wisata, sedangkan keterbatasan kapasitas masyarakat menghambat peningkatan nilai tambah ekonomi.

Strategi pertama adalah meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Hasil tangkapan perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang lebih beragam, memiliki kualitas konsisten, kemasan yang baik, legalitas usaha, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Pengembangan produk dapat diarahkan pada ikan asin, terasi, kerupuk hasil laut, produk kepiting dan rajungan, makanan siap saji, serta produk khas Ujung Pandaran. Asriati dan Wardani (2023) menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi kelembagaan yang mendukung diversifikasi produk, akses permodalan, kepastian harga, dan peningkatan pendapatan anggota. Karena itu, penguatan koperasi atau kelompok usaha bersama dapat digunakan untuk mengonsolidasikan bahan baku, produksi, pengemasan, pembiayaan, dan pemasaran.

Strategi kedua adalah memperkuat kemampuan manajerial dan pemasaran pelaku usaha. Produk lokal tidak akan memberikan nilai tambah yang optimal apabila masih dipasarkan secara terbatas dan tidak memiliki identitas yang kuat. Pelatihan perlu diarahkan pada pengelolaan keuangan, pengendalian kualitas, desain kemasan, perizinan, pemasaran digital, dan pengembangan merek kolektif. Widanarni et al. (2026) menegaskan bahwa pembangunan pesisir berkelanjutan membutuhkan penguatan kapasitas manusia, pembelajaran, dan inovasi hijau. Dalam konteks Ujung Pandaran, inovasi hijau dapat diterapkan melalui penggunaan bahan baku secara efisien, pemanfaatan limbah hasil perikanan, kemasan yang lebih ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah di kawasan wisata.

Strategi ketiga adalah mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat lokal perlu ditempatkan sebagai pengelola dan penerima manfaat utama melalui pengembangan penginapan masyarakat, kuliner pesisir, pemandu wisata, penyewaan sarana rekreasi, produk suvenir, dan atraksi budaya lokal. Rozaki et al. (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan tata kelola yang transparan menentukan pemerataan manfaat ekonomi pariwisata pesisir. Abbas et al. (2025) juga menemukan bahwa *community-based ecotourism* dapat memperkuat ekonomi sekaligus konservasi karena masyarakat memperoleh insentif langsung untuk menjaga lingkungan. Penguatan Pokdarwis karena itu perlu mencakup kemampuan manajerial, penyusunan paket wisata, promosi digital, pengelolaan kebersihan, dan transparansi pembagian manfaat ekonomi.



Strategi keempat adalah menerapkan kolaborasi *pentahelix*. Herkulana et al. (2023) menemukan bahwa pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal membutuhkan keterlibatan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan media. Model tersebut relevan bagi Desa Ujung Pandaran karena setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda. Pemerintah daerah berperan menyediakan regulasi, perlindungan pantai, infrastruktur, perizinan, dan program pemberdayaan. Perguruan tinggi berkontribusi melalui penelitian, inovasi produk, pelatihan, dan pendampingan. Pelaku usaha dan lembaga keuangan menyediakan akses pembiayaan, teknologi, serta jaringan pasar. Masyarakat menjadi pengelola utama kegiatan ekonomi, sedangkan media mendukung promosi produk, destinasi, dan edukasi lingkungan.

Konservasi pesisir harus menjadi fondasi seluruh strategi tersebut. Rehabilitasi vegetasi pantai, perlindungan garis pantai, pengelolaan sampah, dan pengendalian aktivitas yang mempercepat kerusakan diperlukan untuk menjaga produktivitas perikanan serta kualitas destinasi wisata. Konservasi tidak seharusnya dipandang sebagai biaya yang menghambat pertumbuhan, tetapi sebagai investasi untuk mempertahankan sumber daya yang menghasilkan pendapatan masyarakat. World Bank (2024) menegaskan bahwa pendekatan *blue economy* menghubungkan kesehatan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan penghidupan masyarakat pesisir.

Secara praktis, strategi pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap. Prioritas jangka pendek adalah memperbaiki fasilitas yang terdampak,

mendata pelaku ekonomi, memperkuat kelompok usaha, dan memberikan pelatihan produksi serta pemasaran. Prioritas jangka menengah meliputi pengembangan merek kolektif produk Ujung Pandaran, perluasan pemasaran digital, penguatan Pokdarwis, akses pembiayaan, dan pengembangan paket wisata berbasis masyarakat. Prioritas jangka panjang diarahkan pada perlindungan garis pantai, rehabilitasi ekosistem, integrasi rantai nilai perikanan dan pariwisata, serta pembentukan tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan. Strategi tersebut memungkinkan Desa Ujung Pandaran tidak hanya bertahan menghadapi abrasi, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi pesisir Desa Ujung Pandaran ditopang oleh sektor perikanan tangkap, usaha mikro berbasis hasil laut, dan pariwisata bahari, tetapi keberlanjutannya menghadapi tekanan akibat abrasi yang merusak fasilitas, membatasi ruang aktivitas usaha, dan meningkatkan ketidakpastian pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi pesisir berkelanjutan memerlukan integrasi antara perlindungan kawasan pantai, peningkatan nilai tambah produk perikanan, diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta media. Pemerintah daerah disarankan menyusun program terpadu yang menghubungkan penanganan abrasi dengan pendampingan usaha, akses pembiayaan,



pemasaran digital, penguatan kapasitas Pokdarwis, dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif di satu desa sehingga belum mengukur secara kuantitatif perubahan pendapatan, omzet usaha, jumlah kunjungan wisatawan, dan nilai kerugian ekonomi akibat abrasi serta belum menggambarkan perubahan dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran, data longitudinal, dan perbandingan beberapa wilayah pesisir untuk mengukur dampak ekonomi abrasi serta menguji efektivitas strategi pembangunan ekonomi pesisir secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. H. I., Qurrata, V. A., Yusida, E., Priambodo, M. P., Mohd. Shafiai, M. H., Saputra, J., & Cahayati, N. (2025). Sustainable development in coastal regions: Integrating blue economy and community ecotourism for poverty eradication. *Environment and Ecology Research*, 13(2), 198–212.
- Adam, I. (2021). Tourists' perception of beach litter and willingness to participate in beach clean-up. *Marine Pollution Bulletin*, 170, 112591.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Asriati, N., & Wardani, R. K. (2023). Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat pesisir melalui diversifikasi produk olahan hasil laut. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 8(2), 145–158.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2024). *Kabupaten Kotawaringin Timur dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bagindo, A., Putra, D., & Suryani, E. (2023). Dampak abrasi pantai terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan di pesisir Kalimantan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan*, 12(1), 45–58.
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Food and Agriculture Organization [FAO]. (2022). *The state of world fisheries and aquaculture 2022: Towards blue transformation*. FAO.
- Herkulana, S., Widodo, S., & Kusumawati, A. (2023). Model pentahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(2), 189–204.
- Hidayati, S., & de Vries, J. (2025). Value chain development and institutional strengthening in coastal commodity development. *Marine Policy*, 172, 106345.
- Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC.



- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Masri, A., Rahman, F., & Siregar, R. (2025). Livelihood sustainability in coastal tourism destinations: The role of livelihood assets, adaptive capacity, governance, and ecosystem quality. *Tourism Management Perspectives*, 54, 101284.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2023). *The ocean economy to 2050*. OECD Publishing.
- Pang, J., Liu, Y., & Chen, X. (2023). Coastal erosion and socio-economic risks in coastal communities: A global perspective. *Coastal Engineering*, 182, 104293.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490.
- Rozaki, F., Rahayu, S., & Mardianto, D. (2025). Community participation and governance transparency in coastal tourism economic benefit distribution. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(4), 678–695.
- Sakka, A., & Baharuddin, A. (2021). Perubahan garis pantai dan penanganan abrasi di Pantai Ujung Pandaran, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 9(2), 112–125.
- Scoones, I. (2022). *Sustainable livelihoods and rural development*. Practical Action Publishing.
- Stacey, N., Gibson, E., & Loneragan, N. R. (2021). The role of small-scale fisheries in supporting livelihoods, food security, and well-being in Indonesia. *Marine Policy*, 132, 104681.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suradja, F., Wijaya, H., & Lestari, P. (2024). Tourism as an alternative livelihood for coastal communities: Challenges and opportunities. *Journal of Coastal Development*, 27(2), 89–104.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- United Nations. (2024). *The blue economy and sustainable development*. United Nations Conference on Trade and Development.
- United Nations Environment Programme [UNEP]. (2022). *Blue economy: Sustainable development for oceans and coastal resources*. UNEP.
- Widanarni, W., Rahayu, S., & Kurniawan, F. (2026). Penguatan kompetensi



lingkungan, pembelajaran, dan inovasi hijau untuk ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, 11(1), 23–38.

World Bank. (2023). *The blue economy: Development in a changing climate*. World Bank.

World Bank. (2024). *Sustainable ocean economy: A framework for action*. World Bank.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

